

Jawa Pos  
Selasa, 5 Agustus 2014

## Jalan Mendaki Jokowi

### Wahyudi Kumorotomo

*"Two years into his administration, the public resisted his calls for support and Congress was deadlocked over many of his major policy proposals".*

Kalimat di atas adalah gambaran pemerintahan Obama di AS seperti ditulis dalam analisis G. Edwards di buku *Overreach* (2012). Kendatipun konteksnya berbeda, yang dihadapi pasangan Jokowi-Kalla setelah kemenangan Pilpres 2014 mirip kemenangan Obama-Biden di AS di tahun 2008. Melihat ketatnya persaingan Pilpres dan rumitnya konstelasi politik di parlemen Indonesia, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh Jokowi supaya tidak mengalami kemacetan kebijakan seperti Obama di AS.

Ketika masih mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi punya kegemaran mendaki gunung dan dikenal sebagai pribadi pantang menyerah. Kini, setelah ditetapkan sebagai presiden Indonesia yang ke-7 oleh KPU, pembuktian Jokowi untuk menghadapi medan pendakian berikutnya ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Melihat opini publik yang berkembang, tantangan bagi Jokowi bukan lagi masalah legitimasi hasil Pilpres yang sedang digugat ke MK oleh kubu Prabowo-Hatta, tetapi bagaimana membuat kebijakan yang efektif agar janji-janji politiknya dapat dipenuhi selama lima tahun mendatang.

### Oposisi Kebijakan

Dalam pidato di Sunda Kelapa setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres, Jokowi menyerukan agar perseteruan yang terjadi karena perbedaan pilihan dalam Pilpres segera diakhiri. Tema pidato Obama setelah memenangi Pilpres di AS tahun 2008 juga sangat mirip. Dia meminta supaya perbedaan antara faksi merah (partai Republik pendukung McCain) dan faksi biru (partai Demokrat pendukung Obama) segera diakhiri sehingga terjadi rekonsiliasi nasional. Namun pidato Obama itu tampaknya tidak banyak digubris oleh para politisi.

Meskipun kelihaihan persuasi Obama pada awalnya membuahkan kebijakan reformasi tunjangan kesehatan yang terkenal dengan *Obamacare*, di tingkat implementasi kurang efektif. Kebijakan menekan defisit anggaran, pengendalian senjata api, atau *green policy* yang sangat penting bagi masalah pemanasan global, belum bisa terwujud dan masih terapung-apung menjadi agenda perdebatan sengit di Kongres. *Obstructionism* dalam legislasi bahkan berlanjut dalam masa jabatan kedua sekarang ini. Akibat dari oposisi kebijakan itu bahkan tampak konyol seperti terjadinya penghentian layanan oleh pemerintah (*shut down*) di Washington pada bulan Oktober 2013 lantaran Kongres tidak kunjung menyetujui anggaran.

Apakah Jokowi sudah mengantisipasi oposisi kebijakan semacam itu dalam masa jabatan sebagai presiden sampai 2019? Sebagai pemegang amanah rakyat yang menyatakan siap menang, tentu banyak hal sudah dan

akan dipersiapkan hingga pelantikan presiden 20 Oktober nanti. Tetapi tantangannya memang tidak enteng. Di awal, Jokowi harus membuktikan bahwa sebagai presiden tidak didikte oleh tokoh dari partai pendukungnya sendiri. Siapapun mafhum bahwa pencalonan Jokowi oleh PDIP yang menunggu terlalu lama menunjukkan betapa besar peran Megawati sebagai pimpinan partai.

Tantangan kedua adalah kesiapan menghadapi garangnya DPR. Koalisi partai pendukung Jokowi hanya menguasai 37 persen kursi di DPR, proporsi yang sangat sulit untuk menghadapi oposisi legislatif. Setelah pengumuman resmi KPU, sebagian pakar memang mengatakan bahwa pada akhirnya Koalisi Permanen Merah-Putih bubar. Sinyal dukungan ke Jokowi sudah disampaikan oleh beberapa politisi partai Golkar, PPP, Demokrat dan mungkin PAN. Sebagai partai yang terbiasa menjadi bagian dari pemerintahan, usulan sejumlah politisi Golkar untuk menyergerakan Munas menjadi pertanda beralihnya dukungan ke Jokowi. Demikian pula, politisi PPP, Demokrat maupun PAN mungkin banyak yang bersiap menyeberang. Tidak ada yang mustahil dalam politik. Tetapi bahwa DPR tidak akan ramah terhadap Jokowi, sebagaimana tidak ramahnya Kongres terhadap Obama, kiranya sudah dapat terbaca sejak awal.

Masa transisi dan pembentukan kabinet menjadi pertarungan besar. Pilihan membentuk kabinet pelangi atau sebaliknya kabinet ahli (*zaaken cabinet*) sama-sama mengandung konsekuensi berat. Mengakomodasi tokoh Parpol dari seberang kubu akan mengurangi oposisi kebijakan di legislatif, tetapi berpotensi mengulang kesalahan koalisi besar seperti pada masa pemerintahan SBY. Sebaliknya, membentuk kabinet ahli berarti memenuhi janji politik dan kebijakan pemerintah akan lebih efektif, tetapi Jokowi harus bersiap menghadapi oposisi di legislatif yang siap mencegat apapun kebijakan yang diusulkan.

### **Keberanian Tidak Populer**

Rumah Transisi menjadi awal bagi Jokowi untuk menyiapkan RAPBN 2015 bersama pemerintahan SBY dan mengatasi defisit fiskal. Kebutuhan subsidi energi (terutama BBM dan listrik) kini sudah mendekati angka Rp 400 triliun dan harus segera diatasi dengan kebijakan nasional yang tepat. Sayangnya, dua opsi kebijakan paling strategis untuk menekan defisit fiskal sudah pasti kurang populer. Pertama, kenaikan harga BBM. Ketika presiden SBY masih menikmati bulan madu dengan mandat 62% suara Pilpres pada tahun 2004, kenaikan harga BBM lebih dari 100 persen tidak banyak menimbulkan resistensi. Namun situasi yang dihadapi satu dasawarsa berikutnya oleh Jokowi sungguh berbeda. Tidak ada masa bulan madu bagi Jokowi. Diperlukan kepiawaian komunikasi politik yang luar biasa untuk mengambil pilihan menaikkan harga BBM dengan mandat yang tipis sekarang ini.

Kedua, mengurangi pertumbuhan mobil pribadi sembari menyediakan transportasi publik yang efisien dan murah. Infrastruktur adalah masalah yang selama ini terbengkalai sehingga mengakibatkan daya-saing Indonesia terus terpuruk. Tetapi, apapun instrumen kebijakan yang digunakan, pengendalian kendaraan pribadi adalah langkah tidak populer di tengah kebiasaan kelas

menengah Indonesia yang telanjur nyaman dengan fasilitas yang memboroskan energi tidak terbarukan ini.

Pemberantasan korupsi pasti akan didukung seluruh rakyat karena inilah agenda kebijakan yang belum diwujudkan oleh pemerintahan sebelumnya. Namun resistensi terhadap kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi bisa saja mendorong sabotase oleh aparat pemerintah yang mengakibatkan tumpulnya efektivitas implementasi kebijakan. Jalan mendaki dan terjal harus dihadapi oleh Jokowi. Namun kita berharap bahwa sebagai presiden pilihan rakyat Jokowi benar-benar bisa membawa perubahan menuju terwujudnya bangsa yang lebih makmur dan sejahtera.

\*\*\*\*\*

Penulis adalah guru besar pada Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik,  
Fisipol UGM